

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hudri, *Badai Politik Uang Dalam Demokrasi Lokal*, Inteligencia Media, 2020, Malang, hlm. 46.
- Andiraharja, D. G, *Politik Hukum pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu*. Khazanah Hukum, 2(1), 2020, hlm. 24-31.
- Asmawati Asmawati, Towar Ikbal Tawakkal, and Sholih Muadi. 2021. "Religion, Political Contestation and Democracy: Kiai's Role as Vote Broker in Madurese Local Political Battle," *Buletin Al-Turas* 27, no. 1
- Begouvic, H, E (2021), *Money Politik Pada Kepemiluan Di Indone*, Sol Justicia, VOL.4 NO.2, 2021, hlm 105-122
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1992
- Edward Aspinall, 2014. "WHEN BROKERS BETRAY: Clientelism, Social Networks, and Electoral Politics in Indonesia," *Critical Asian Studies* 46, no. 4 .
- Fuadi, Mohammad A., et al. "Hubungan Tokoh Agama Dan Politik Uang Terhadap Kontribusi Perolehan Suara H. Amin, S.h Pada Pilkada Kabupaten Ponorogo Tahun 2010." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Undip*, vol. 3, no. 3, 2014, hlm 356-365.
- George Towar et al., 2017. "Asian Affairs : An American Review Why Brokers Don ' t Betray : Social Status and Brokerage Activity in Central Java Why Brokers Don ' t Betray : Social Status," *Asian Affairs: An American Review* 44, no. 2 .
- Hasanul Bulqiyah, Sholeh Muadi, and George Towar Ikbal Tawakkal. 2019. "Pemilihan Kepala Desa Dam Partisipasi Masyarakat Marjinal: Studi Kasus Di Pulau Bawean, Indonesia," *Jurnal Wacana Politik* 4, no. 1 .
- Indra Ismawan, *POLITIK UANG Pengaruh Uang dalam Pemilu*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2008, hlm. 4.
- Ismawan. *Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, Media Pressindo, Yogyakarta, 1999, hal. 5.
- Juang Gagah Mardhika, Rina Martini, and Fitriyah Fitriyah, "Kegagalan Praktik Patronase-Klientelisme Pada Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Klaten Tahun 2019," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4, no. 1 (2021), hlm. 300.

- Junaidi, Tindak Pidana Pemilu dan Pilkada oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2), 2020, hlm. 220-234.
- Karmanis, 2020. "Electronic-Voting (e-Voting) Dan Pemilihan Umum," *Mimbar Administrasi* 18, no. 2 .
- Kilapong, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *Lex Crimen*, 9(3), 2020.
- Legowo, Sebastian Salang, Panduan Menjadi Anggota DPR/DP/DPRD Menghadapi Pemilu, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm. 33.
- Lenak, S. C., Sumampow, I., & Waworundeng, W. (2021). Efektivitas Pelayanan Publik Melalui Penerapan Electronic Government Di Dinas Pendidikan Kota Tomohon. *GOVERNANCE*, 1(1), 2021.
- Lesmana Rian Andhika, "Bahaya Patronase Dan Klientelisme Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak," *Kajian* 22, no. 3 (2017), hlm. 206.
- Masyhuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*,. Teori dan Aplikasi. Penerbit Alfabeta : Bandung, 2008, hal. 100.
- Mitha Larasati and Vidya Ningtiyas, 2017. "Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Abstrak Latar Belakang Rumusan Masalah Tinjauan Pustaka".
- Muhammad Nur Ramadhan. 2021. "Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019," *Jurnal Adhyasta Pemilu* 2, no. 2 .
- Rekha Adji Pratama, "Patronase, Klientalisme Dan Tahta Putra Mahkota Pada Pilkada Kota Kendari Tahun 2017," *Jurnal Wacana Politik* 2, no. 1 (2017), hlm. 35.
- Richard M Streets, *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 1985, hlm. 46.
- Sanjaya, D. H., & Priyadi, M. P, Analisis Value For Money Dalam Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(12), 2019, hlm. 4.
- Sukawati Lanang P Perbawa. 2019. "Penegakan Hukum Dalam Pemilihan Umum," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 3, no. 1 .
- Sunarti, Efektivitas Pemberdayaan Dalam Pengembangan Kelompok Tani Di Pedesaan. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 2019, hlm. 83.

Suprianto, L, O, Arsyad, M (2017), Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Uang Pada Pilkada Serentak (Studi Di Desa Ronta Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara), *Neo Societal*; Vol. 2; No. 1.

Teguh Anggoro, “Politik Patronase Dan Klientelisme Purnawirawan Tni Pada Pemilu Legislatif,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah* 4, no. 1 (2019) hlm. 64.

Kilapong, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *Lex Crimen*, 9(3), 2020.

